

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, S., 2002, *Manajemen Transportasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- ASEAN, 2004, *Action Plan for ASEAN Air Transport Integration and Liberalization. ASEAN Document Series, 221–226*, Jakarta, ASEAN Secretariat.
- ASEAN, 2008, *ASEAN Economic Community Blueprint*, Jakarta, ASEAN Secretariat.
- ASEAN, 2010, *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jakarta, ASEAN Secretariat.
- Ibrahim, J., 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, UMM Press.
- Kementerian Perdagangan, 2012, *Jasa Transportasi*, Jakarta.
- Martono, H.K., Pramono, A., 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- QC, Malcolm N.S., 2013, *Hukum Internasional*, Bandung, Nusa Media.
- Simanjuntak, Emmy P., 2009, *Pengenalan Singkat GATT dan WTO*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Soekamto Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Subekti R, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bandung.

Sumardjono, Maria, S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

WTO Publications, 2007, *Air Transport and The GATS*.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Annex 1B, *General Agreement on Trade in Services*, World Trade Organisation.

*Convention on International Civil Aviation*, ditandatangani di Chicago tanggal 7 Desember 1944.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation*

*Part 49*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft*

*Registration*), Nomor KM. 49 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang

tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di

Bidang Penanaman Modal.